

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, FAKTOR POLITIK, DAN MANAJEMEN RISIKO ORGANISASI TERHADAP OPINI AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Luky Arjun Darmawan¹, Kuwat Slamet²

^{1,2} Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Indonesia
Email korespondensi: ¹ 1401190022.luky@pknstan.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti seberapa besar pengaruh kesejahteraan masyarakat, faktor politik, dan manajemen risiko organisasi terhadap pertanggungjawaban keuangan daerah yang diwakili oleh opini audit. Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia sebanyak 542 pemerintah daerah. Sampel penelitian dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh 435 pemerintah daerah. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui lembaga-lembaga terkait pada periode tahun 2017–2019. Analisis data menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap opini audit laporan keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan faktor politik, berupa jangka waktu terhadap pemilu dan politik dinasti, dan audit internal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap opini audit laporan keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah daerah pada periode selanjutnya untuk melakukan evaluasi yang akurat terhadap faktor yang perlu diprioritaskan dalam mendorong pertanggungjawaban kinerja dan keuangannya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sistem pengendalian internal.

Kata Kunci: faktor politik; kesejahteraan masyarakat; manajemen risiko organisasi; opini audit; pemerintah daerah

ABSTRACT

This study aims to examine how much influence public welfare, political factors, and organizational risk management have on local financial accountability represented by audit opinion. The population of this study is all local governments in Indonesia as many as 542 local governments. This study use purposive sampling method and obtained 435 local governments. Research data in the form of secondary data obtained through related institutions in the period 2017-2019. Data analysis using multiple linear regression method. The results showed that public welfare and the internal control system had a positive influence on the audit opinion of the local government's financial statements, while political factors, in the form of a period of time on elections and dynastic politics, and internal audit did not have a significant effect on the audit opinion of the local government's financial statements. Based on the results of this research, the local government in the next period to conduct an accurate evaluation of the factors that need to be prioritized in encouraging performance and financial accountability by improving the welfare of the community and the internal control system.

Keywords: audit opinion; political factors; public welfare; organizational risk management; regional government

KETERANGAN ARTIKEL

Riwayat Artikel: diterima: 15 Februari 2021; direvisi: 30 Maret 2021; disetujui: 28 Mei 2021

Klasifikasi JEL: H83

Cara mensitasi: Darmawan, L. A., & Slamet K. (2021). Kesejahteraan Masyarakat, Faktor Politik, dan Manajemen Risiko Organisasi terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 7(1), 73–88. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v7i1.3033>



PENDAHULUAN

Penilaian akuntabilitas kinerja daerah menjadi hal wajib untuk mengukur sejauh mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini digunakan untuk kepentingan rakyat. Salah satu parameter yang mencerminkan akuntabilitas kinerja daerah adalah opini audit yang dihasilkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BPK memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu, dalam Undang-Undang tersebut Gubernur/Bupati/Walikota diamanahkan untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK. Dalam mencapai opini audit BPK yang memuaskan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pemerintah daerah telah berhasil melampaui target yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019. Pemerintah daerah mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tingkat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota berturut-turut sebesar 94%, 79%, dan 90% dari target sebesar 85%, 60%, dan 65% populasi LKPD.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 selaras dengan prinsip *good governance* yang diusung oleh *United Nation Development Program* (UNDP). UNDP menyebutkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu pemerintahan yang dapat mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Terdapat 3 pilar yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pencapaian *good governance*, yaitu pemerintah, korporasi, dan masyarakat. Pemerintah memiliki peran sentral dalam memfasilitasi baik sektor swasta maupun masyarakat untuk dapat berkembang. Sektor swasta dalam hal ini turut berkontribusi menyediakan lapangan pekerjaan sekaligus memutar roda perekonomian, sehingga masyarakat dapat hidup dengan layak dan berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan nasional. Konsekuensi logis dari hubungan ketiga pilar ini dapat dianalogikan seperti hukum ekonomi, di mana antar satu dengan yang lain dapat memaksimalkan fungsi produksi dan konsumsinya masing-masing. Prinsip *good governance* juga tercerminkan dalam proses tata kelola keuangan mulai dari penyusunan anggaran, pertanggungjawaban laporan keuangan, sampai dengan pemeriksaan atas laporan keuangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam paket undang-undang keuangan negara.

Masyarakat Indonesia yang sudah mencapai tingkatan hidup sejahtera, dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) interval tahun 2010—2019 yang terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019, yaitu mencapai angka 71,92 (data BPS), mempunyai motivasi lebih besar untuk meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Kesadaran akan akuntabilitas dan transparansi telah mengeskalasi tingkat kepentingan saluran pengaduan, yang biasa disebut *whistleblowing*, sebagai salah satu alat untuk menjaga hal tersebut dalam tata kelola pemerintahan. Aplikasi *whistleblowing* menjadi salah satu *tools* yang ampuh bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan kinerja aparat pemerintah daerahnya secara langsung. Rekapitulasi data pelaporan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) interval tahun 2015—2019 mengalami peningkatan berturut-turut sebagai berikut: 282, 423, 514, 734, dan 380. Meskipun pada tahun 2019 menurun, tetapi tren peningkatan jumlah laporan masyarakat yang signifikan antara tahun 2015 s.d. 2018 adalah sebuah indikasi bahwa kesadaran masyarakat dalam mengawal pemerintahan sudah meningkat pesat. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui indikator pendidikan, kesehatan, dan tingkat pendapatan masyarakat merupakan kunci dari pembangunan masyarakat, sehingga peningkatan ketiga indikator tersebut memberikan perspektif yang lebih baik dalam membantu masyarakat berkontribusi dalam pencapaian *good governance* (Swaroop & Rajkumar, 2002).

Tata kelola keuangan daerah juga tidak terlepas dari faktor politik. Kepentingan politik merupakan salah satu faktor yang memengaruhi akuntabilitas daerah (Giroux, 2011), di mana harapan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sangat tinggi tetapi dapat terganjal oleh adanya birokrasi politik yang rumit. Proses pemilihan kepala daerah merupakan pintu masuk menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel untuk mendapatkan kepala daerah yang amanah. Namun, tidak sedikit juga terdapat praktik politik dinasti yang mencederai semangat pembangunan karena dipandang berpotensi menimbulkan sistem pemerintahan yang koruptif.

Sepanjang tahun 2016, KPK mencatat telah menangani sebelas kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, dengan enam di antaranya diketahui berkaitan dengan dinasti politik. Fenomena ini semakin menguatkan bahwa dinasti politik turut melanggengkan praktik korupsi maupun perilaku koruptif lainnya. Berkaitan dengan praktik politik pencitraan, kepala daerah yang cenderung mengeskalasi kinerjanya hanya saat menjelang akhir periode jabatan menjadi sebuah pendukung campur tangan faktor politik. Mekanisme politik dan pengawasannya dapat memengaruhi tata kelola keuangan pemerintahan melalui berbagai cara baik melalui kepentingan partai politik, hubungan antarmasyarakat, dan hubungan eksekutif-legislatif (Gourevitch, 2003).

Faktor selanjutnya adalah terkait dengan pengelolaan internal sebuah organisasi, khususnya sektor publik. Seiring berjalannya waktu serta perkembangan informasi dan teknologi, manajemen risiko organisasi bukan hanya menjadi prasyarat bagi organisasi sektor privat, namun sudah menjadi sebuah hal wajib bagi organisasi sektor publik. Pengendalian intern dilakukan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pengendalian intern yang baik dapat digunakan untuk mengelola dan memitigasi risiko dalam pencapaian tujuan organisasi. Telah banyak cerita sukses baik manajemen lini maupun inspektorat yang mengklaim telah menyelamatkan uang negara melalui sistem pertahanan berlapisnya. Tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah faktor yang memengaruhi kinerja pemerintah daerah dalam tiga riset yang dilakukan Putri (2012), dan Darmawan (2016). Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga merupakan elemen penegakan akuntabilitas keuangan daerah yang berperan dalam pengawasan lini ketiga setelah manajemen lini yang mampu menunjang kualitas LKPD (Purba, 2014). Sesuai dengan RPJMN Tahun 2015—2019, pemerintah mengamanatkan penilaian maturitas SPIP, APIP, dan RB dilaksanakan dan dikawal masing-masing oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Pada tahun 2019 atau penghujung RPJMN Tahun 2015—2019 diharapkan indeks manajemen risiko organisasi publik melalui ketiga indikator tersebut dapat diraih sesuai target.

Kondisi perbaikan opini audit atas LKPD ini menjadi celah penelitian tentang pengaruh faktor yang sekiranya signifikan terhadap capaian tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis meneliti pengaruh kesejahteraan masyarakat, faktor politik, dan manajemen risiko organisasi terhadap opini audit atas LKPD yang telah diraih pemerintah daerah dalam kurun waktu RPJMN Tahun 2015—2019. Dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini dikembangkan dengan mempertimbangkan faktor manajemen risiko organisasi yang dewasa ini sedang menjadi model yang dipedomani secara umum, dengan mengangkat variabel sistem pengendalian internal dan audit internal. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pembaruan dalam periode data yang diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi mengenai apakah elemen-elemen yang mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja telah diterapkan secara optimal sebagaimana tujuan RPJMN. Selain itu, hasil penelitian empiris ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan dan peningkatan yang berkelanjutan atas tata kelola kinerja dan keuangannya.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Peran Kesejahteraan Masyarakat

Sejak dimulainya era reformasi sampai dengan sekarang, pemerintah tidak pernah terputus mengalokasikan anggaran besar di bidang pendidikan sesuai dengan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diamanatkan undang-undang. Belanja fungsi pendidikan kini sudah mengalir dari mulai pendidikan dasar hingga tinggi dengan kepentingan dan porsinya masing-masing. Tingginya tingkat pendidikan masyarakat akan meningkatkan fungsi pengawasan yang dilakukan masyarakat untuk mencapai pemerintahan yang akuntabel (Swaroop & Rajkumaar, 2002). Kesehatan juga merupakan variabel yang menentukan kesejahteraan masyarakat. IPM yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat berasal dari salah satunya indeks kesehatan masyarakat. Angka harapan hidup masyarakat yang meningkat mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat yang semakin baik. Giroux (2011) dalam penelitiannya membuktikan bahwa tingkat pendapatan masyarakat memiliki pengaruh terhadap kualitas audit dan pengelolaan keuangan daerah. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar melalui tingkat pendapatan yang baik, masyarakat dapat membagi fokus untuk turut melakukan pengawasan terhadap pemerintahan.

Dalam perspektif Suseno (1999), terwujudnya masyarakat yang sejahtera beberapa berjalan sendiri, tetapi beberapa pula terkait pada keputusan-keputusan politik ditingkat elit politik dan struktural. Oleh sebab itu, situasi yang kondusif perlu dilahirkan, diawali dengan deregulasi ekonomi yang membidik pada penghapusan prinsip-prinsip semacam kartel, dominasi, penyalahgunaan sistem koneksi atas raihan ekonomi tertentu. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah upaya mendorong transparansi politik dalam tahapan selaras dengan perkembangan perekonomian guna memberi ruang untuk tumbuh dan berkembangnya demokratisasi. Oleh karena itu, berdasarkan alasan tersebut, kesejahteraan masyarakat dijadikan sebagai variabel yang kemungkinan berdampak terhadap akuntabilitas keuangan daerah melalui opini auditnya sehingga disusun hipotesis sebagai berikut:

H₁: tingkat kesejahteraan masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap opini audit LKPD.

Faktor Politik

Arah kebijakan pemerintah ditentukan oleh proses pemilihan umum (Pemilu), baik untuk pemerintah pusat dan daerah. Keberlanjutan maupun arah kebijakan baru dari pemerintahan, khususnya daerah, sudah mulai ditentukan ketika memilih kepala daerah. Faktor politik tidak terlepas dari proses pemilihan yang berlangsung baik berupa strategi petahana dalam mempertahankan jabatan maupun pendaftar baru yang ingin masuk. Dalam mempertahankan citranya, petahana kerap kali akan melakukan segala cara agar dapat mendapatkan kembali atensi rakyatnya, salah satunya dengan mendorong kinerjanya mendekati periode akhir jabatannya. Hal lain yang dapat terjadi adalah politik dinasti, di mana fenomena ini juga sudah kerap terjadi untuk meneruskan jabatan kepala daerah, baik dari garis partai politik maupun keluarga, sehingga kesempatan rakyat mendapatkan pemimpin yang kompeten dan akuntabel tidak terjamin. Keduanya memberikan celah yang tidak baik bagi akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Faktor politik ini didasarkan pada teori keagenan yang dijelaskan oleh Jensen & Meckling (1976), yaitu sebuah kontrak yang mendasari pendelegasian wewenang dari *principal* kepada *agent* untuk melaksanakan garis besar layanan/operasi organisasi. Baik *principal* ataupun *agent* diasumsikan seseorang dengan pemikiran yang rasional, khususnya dalam hal ekonomi, dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, berdasarkan alasan tersebut, faktor politik dijadikan sebagai variabel yang kemungkinan berdampak terhadap akuntabilitas keuangan daerah melalui opini auditnya sehingga disusun hipotesis sebagai berikut:

H₂: jangka waktu dengan pemilu memiliki pengaruh negatif terhadap opini audit LKPD.

H₃: politik dinasti memiliki pengaruh negatif terhadap opini audit LKPD.

Manajemen Risiko Organisasi

Konsep *Governance, Risk, and Control* (GRC) adalah model tata kelola organisasi yang sejauh ini paling efektif dan digunakan secara umum baik organisasi privat maupun publik. Berbicara mengenai konsep *good public governance* yang menuntut akuntabilitas keuangan dan kinerja yang tinggi, proses pembentukan tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal menjadi bagian integral yang saling tidak terpisahkan. *Financial Services Authority* (FSA), otoritas pengawas keuangan di Inggris, mencetuskan cikal bakal konsep *Three Lines of Defense Model*, yang nantinya akan diturunkan menjadi tiga elemen kunci termasuk di dalamnya adalah manajemen risiko. Pada tahun 2010, FSA melalui *consultation guidance*-nya mengeskalisasi tingkat kepentingan *Three Lines of Defense Model* dan merumuskan bahwa untuk meningkatkan budaya sadar risiko dan pemahaman untuk menanganinya, *Three Lines of Defense Model* disebut sebagai model yang relevan dalam tata kelola risiko dan pengendalian internal untuk beragam jenis organisasi berkaitan dengan tingkat ketatnya intensitas dan alur koordinasi tata kelola tiap unit dalam sebuah organisasi.

Pemerintah mengimplementasikannya melalui Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 menyebutkan bahwa reformasi birokrasi (RB) dilaksanakan dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara membentuk SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif, pemerintahan yang terbuka dan melayani, dan pemerintahan yang akuntabel dan bersih dari tindakan yang koruptif. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan penilaian terhadap tingkat kematangan reformasi birokrasi dari pemerintah pusat hingga daerah untuk memastikan *governance* yang baik. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga menitikberatkan pada pengelolaan risiko, di mana elemen tersebut merupakan landasan yang seiring berkembangnya zaman, menjadi penting bagi pencapaian tujuan dari sebuah organisasi. Fokus tersebut menjadi mutlak diperlukan karena kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan yang kaitannya dengan kepentingan masyarakat luas, akan mengakibatkan *distrust* masyarakat terhadap pengelolaan pemerintahan ke depannya. Kaitannya dengan hal tersebut, jika ditemukan kelemahan yang rendah pada sistem pengendalian internal maka kemungkinan organisasi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian menjadi tinggi (Darmawati, 2017).

Sejalan dengan teori rasionalitas terbatas, auditor akan memperluas pengujian pengendaliannya jika pendapat sebelumnya merugikan. Sebaliknya jika pada tahun sebelumnya opini Wajar Tanpa Pengecualian, auditor tidak akan memperluas uji pengendalian, karena dipengaruhi oleh opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun sebelumnya (Junaidi dkk., 2015). Tingkat kematangan SPIP dan APIP menjadi tolok ukur yang memengaruhi akuntabilitas daerah melalui opini audit masing-masing dijelaskan dalam penelitian Rasmini (2018) dan BPKP (2016). Pemerintah melalui RPJMN 2015-2019 juga secara relevan memberikan target yang tinggi terhadap peningkatan kematangan SPIP dan APIP untuk mendukung pembangunan nasional yang akuntabel dan sesuai cita-cita bangsa. Oleh karena itu, berdasarkan alasan tersebut, peran manajemen risiko organisasi dijadikan sebagai variabel yang kemungkinan berdampak terhadap akuntabilitas keuangan daerah melalui opini auditnya sehingga disusun hipotesis sebagai berikut:

H₄: sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap opini audit LKPD.

H₅: audit internal memiliki pengaruh positif terhadap opini audit LKPD

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan ukuran angka yang pasti mengenai hubungan antarvariabel dalam menguji hipotesis. Desain yang digunakan adalah penelitian korelasional yang menjelaskan korelasi antara kesejahteraan masyarakat, faktor politik, dan manajemen

risiko organisasi terhadap opini audit. Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di Indonesia sejumlah 542 pemda. Sampel penelitian dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria kelengkapan data. Pemda yang tidak memiliki data yang lengkap dieliminasi dari sampel sehingga diperoleh 435 sampel. Tipe data untuk penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan berdasarkan publikasi resmi oleh pemerintah dan data yang diolah adalah menggunakan data *time-series* yang terdiri dari tahun 2017, 2018, dan 2019. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda.

Tabel 1. Operasional Variabel Dependen

Variabel	Indikator	Ukuran	Metode
Opini Audit (AUOP)	Opini audit BPK-RI tahun bersangkutan (<i>t</i>)		Definitif (sesuai standar tingkatan opini audit)
	1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	4 = WTP	
	2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	3 = WDP	
	3. Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	2 = TMP	
	4. Tidak Wajar (TW)	1 = TW	

Tabel 2. Operasional Variabel Independen

Variabel	Indikator	Ukuran	Metode
Variabel Independen			
Tingkat kesejahteraan masyarakat (HDI)	Indeks Pembangunan Manusia	1/3 (Indeks Harapan Hidup x Indeks Pendidikan x Indeks Standar Hidup Layak)	Definitif (sesuai dengan formulasi IPM oleh UNDP)
Jangka waktu Pemilu kepala daerah (POLE)	Jarak antara tahun <i>t</i> dengan tahun Pemilu kepala daerah	0 s.d. 5 tahun	Definitif (sesuai dengan masa bakti kepala daerah)
Politik dinasti (POLD)	Status kekerabatan calon kepala daerah dengan kepala daerah sebelumnya	Variabel <i>dummy</i> 0 = Tidak ada politik dinasti 1 = Terdapat politik dinasti	Identifikasi kepala daerah yang memiliki dan tidak memiliki riwayat politik dinasti
Sistem Pengendalian Internal (CTRL)	Nilai tingkat kematangan implementasi SPIP menurut kriteria Perka BPKP	0 = Belum ada 1 = Rintisan 2 = Berkembang 3 = Terdefinisi 4 = Terkelola dan terukur 5 = Optimum	Definitif (sesuai dengan rumusan indeks SPIP oleh BPKP)
Audit Internal (IAUD)	Nilai kapabilitas APIP Daerah menurut kriteria <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM)	1 = <i>Initial</i> 2 = <i>Infrastructure</i> 3 = <i>Integrated</i> 4 = <i>Managed</i> 5 = <i>Optimized</i>	Definitif (sesuai dengan rumusan indeks kapabilitas APIP oleh BPKP)

Tabel 3. Operasional Variabel Kontrol

Variabel	Indikator	Ukuran	Metode
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (FLWP)	Rasio rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dan yang tidak bisa ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti ditambah yang tidak bisa ditindaklanjuti dibagi total nilai rekomendasi	Definitif (sesuai dengan pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK)
Opini Audit Tahun Sebelumnya (PAUOP)	Opini audit BPK-RI tahun sebelumnya 1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 3. Tidak Memberikan Pendapat (TMP) 4. Tidak Wajar (TW)	4 = WTP 3 = WDP 2 = TMP 1 = TW	Definitif (sesuai standar tingkatan opini audit)

Hipotesis penelitian tentang pengaruh antara kesejahteraan masyarakat, faktor politik, dan manajemen risiko organisasi terhadap opini audit diuji dengan menggunakan model persamaan regresi sebagai berikut.

$$AUOP_{i,t} = \alpha_0 + \beta_1 HDI_{i,t} + \beta_2 POLE_{i,t} + \beta_3 POLD_{i,t} + \beta_4 CTRL_{i,t} + \beta_5 IAUD + \beta_7 FLWP_{i,t} + \beta_8 PAUOP_{i,t} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Keterangan persamaan tersebut adalah sebagai berikut: (1) AUOP adalah opini audit, (2) α adalah Konstanta, (3) β adalah Koefisien, (4) HDI adalah Tingkat kesejahteraan masyarakat, (5) POLE adalah Jangka waktu Pemilu kepala daerah, (6) POLD adalah Politik dinasti, (7) CTRL adalah sistem pengendalian internal, (8) IAUD adalah Audit internal, (9) FLWP adalah Tindak lanjut hasil pemeriksaan, (10) PAUOP adalah Opini audit tahun sebelumnya, (11) ε adalah *Error term*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Statistik

Tabel 4 menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif dari kumpulan sampel data penelitian. Dari tabel tersebut disajikan data statistik berupa *mean* (rerata), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi pada variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol pada kurun waktu 2017–2019 secara kumulatif.

Tabel 4. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Std Deviasi	Min	Max
AUOP	1305	4,598	0,841	2	5
HDI	1305	68,773	6,346	27,870	86,650
POLE	1305	2,382	1,601	0	5
POLD	1305	0,046	0,210	0	1
CTRL	1305	2,103	0,089	0	3
IAUD	1305	2,147	0,644	1	3
FLWP	1305	0,623	0,322	0	1
PAUOP	1305	4,435	0,954	2	5

Nilai rata-rata opini audit dari total sampel adalah sebesar 4,598 mendekati angka raihan terbaik, yaitu 5. Hal tersebut menunjukkan kinerja laporan keuangan pemerintah daerah telah dikategorikan baik disandingkan dengan standar yang berlaku.

Variabel indeks pembangunan manusia (HDI) menunjukkan angka terendah dengan 27,87 dan angka tertinggi pada 86,65. Angka indeks pembangunan manusia dibentuk dari aspek pendidikan, kesehatan, dan standar kelayakan hidup yang masing-masing aspek berturut-turut diukur dengan angka harapan hidup pada saat kelahiran, angka harapan sekolah dan angka rerata lama sekolah, dan produk nasional bruto per kapita. *Gap* antara nilai tertinggi dan terendah yang berada pada angka 58,78 menunjukkan masih belum meratanya pembangunan manusia di seluruh daerah, meskipun rata-rata berada pada angka yang cukup, yaitu 68,773.

Variabel jangka waktu Pemilu (POLE) menunjukkan angka terendah dengan 0 dan angka tertinggi 5. Angka tersebut mewakili lama waktu dalam ukuran tahun, setiap daerah di Indonesia memiliki perbedaan periode pelaksanaan pemilihan umum kepala daerahnya. Rata-rata jangka waktu terhadap Pemilu kepala daerah berada pada angka 2,382 atau kurang dari 3 tahun yang menunjukkan banyaknya kepala daerah yang memiliki jangka waktu cukup panjang sebelum masa berakhirnya jabatan untuk tahun penelitian tertentu.

Variabel dinasti politik (POLD) diwakili oleh variabel *dummy*, numerik 1 menunjukkan di suatu daerah terdapat fakta politik kekerabatan dalam pengisian jabatan kepala daerahnya, dan numerik 0 untuk sebaliknya. Rata-rata angka dinasti politik untuk tahun penelitian ini berada pada angka 0,046 atau mendekati 0 yang menunjukkan bahwa walaupun terdapat fakta dinasti politik di daerah tertentu, namun secara menyeluruh hubungan kekerabatan dalam politik masih minimal.

Variabel tingkat kematangan sistem pengendalian internal (CTRL) dalam penelitian ini diwakili oleh angka 0 sampai dengan 3. Angka tersebut merupakan angka murni yang diambil dari indeks kematangan implementasi SPIP setiap pemerintah daerah yang distandarisasi oleh Peraturan Kepala BPKP No. 4 Tahun 2016. Angka maturitas SPIP diwakili dengan angka 0 s.d. 5, berturut-turut mencerminkan kategori "belum ada", "rintisan", "berkembang", "terdefinisi", "terkelola dan terukur", hingga yang tertinggi adalah "optimum". Rata-rata variabel ini berada pada angka 2,103 yang menunjukkan sebagian besar pemerintah daerah telah berada pada level SPIP kategori "Berkembang" meskipun level yang ditargetkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah pada level 3 atau "Terdefinisi".

Variabel tingkat kapabilitas aparat pengawasan intern (IAUD) dalam penelitian ini diwakili oleh angka 1 sampai dengan 3. Angka tersebut merupakan angka murni yang diambil dari indeks kapabilitas APIP setiap pemerintah daerah yang distandarisasi oleh Perka BPKP Nomor 16 Tahun 2015 dan berpedoman pada standar *Internal Audit Capability Model* (IACM) yang berlaku secara internasional. Angka kapabilitas APIP diwakili dengan angka 1 s.d. 5, berturut-turut mencerminkan kategori "Initial",

"Infrastructure", "Integrated", "Managed", dan "Optimizing". Rata-rata variabel ini berada pada angka 2,147 yang menunjukkan sebagian besar pemerintah daerah telah berada pada level APIP kategori "Infrastructure" meskipun level yang ditargetkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah pada level 3 atau "Integrated".

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol untuk mengendalikan hasil pengujian, di antaranya adalah tindak lanjut hasil pengawasan (FLWP) dan opini audit pada tahun sebelumnya (PAUOP). Variabel FLWP diukur dengan rasio tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dihitung dari hasil bagi antara tindak lanjut sesuai rekomendasi (nominal) dan jumlah nominal rekomendasi. Angka tertinggi 1 berarti pemerintah daerah telah 100% menindaklanjuti sesuai rekomendasi pemeriksa, dan sebaliknya untuk angka 0. Rata-rata variabel FLWP berada pada angka 0,623 yang menunjukkan rasio tindak lanjut yang cukup tinggi.

Uji Spesifikasi Model

Untuk menentukan metode estimasi data panel menggunakan *Pooled Least Square* (PLS), *Random Effect* (RE), atau *Fixed Effect* (FE), dilakukan uji spesifikasi model melalui Uji *Breusch-Pagan Lagrange Multiplier* (BP-LM), Uji Chow, dan Uji Hausman. Hasil ketiga uji tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Uji Spesifikasi Model

	Hasil			Kesimpulan
	Prob > F	Prob > chibar2	Prob > chi2	
Uji Chow	0,0000			H ₁ * diterima
Uji BP-LM		1,0000		H ₀ ** diterima
Uji Hausman			0,0000	H ₀ *** diterima

*)H₀=PLS,H₁=FE

*)H₀=PLS,H₁=RE

*)H₀=FE,H₁=RE

Dari hasil uji spesifikasi, ditentukan estimasi model terpilih adalah menggunakan *Fixed Effect* (FE).

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Dalam melakukan pengujian, penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan metode *fixed effect*. Metode *fixed effect* diterapkan setelah penelitian melakukan uji Chow, uji Breusch-Pagan Lagrange Multiplier Test (BP-LM), dan uji Hausman. Penerapan metode *fixed effect* menandakan bahwa model persamaan pengaruh kesejahteraan masyarakat, faktor politik, dan manajemen risiko organisasi terhadap opini audit LKPD memiliki heterogenitas individu secara *fixed*.

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis H₁ hingga Hipotesis H₅

Variabel	Variabel Dependen: AUOP		
	Coeff	t-stat	Prob.
HDI	38,383	2,09	0,037
POLE	-0,015	-0,19	0,851
POLD	0,368	1,12	0,262
CTRL	0,059	2,13	0,034
IAUD	0,002	0,04	0,971
FLWP	0,078	1,24	0,217
PAUOP	0,046	1,36	0,174
C	4,588	24,43	0,000
<i>Adjusted R-squared</i>	0,349		
<i>F-statistic</i>	10,59		
<i>Prob. (F-stat)</i>	0,000		

Berdasarkan pengujian regresi yang sudah dilakukan atas model penelitian ini, didapatkan hasil persamaan regresi sebagai berikut.

$$AUOP_{i,t} = 4,5880 i_{,t} + 38,383HDI_{i,t} + 0,0146POLE_{i,t} + 0,3680POLD_{i,t} + 0,0595CTRL_{i,t} + 0,019IAUD + 0,0784FLWP_{i,t} + 0,046PAUOP_{i,t} + \epsilon_{it} \quad (2)$$

Berdasarkan model persamaan pengaruh kesejahteraan masyarakat, faktor politik, dan manajemen risiko organisasi terhadap opini audit LKPD, diperoleh nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,3485. Hal ini menandakan bahwa model persamaan mampu menjelaskan variasi tingkat opini audit sebesar 34,85 persen dan 65,15 persen lainnya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model persamaan ini. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, penelitian juga melakukan uji kelayakan model (*f-test*) dan diperoleh nilai Prob > F kurang dari 0,05 atau dinyatakan signifikan sehingga regresi layak untuk dianalisis.

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat dan Opini Audit LKPD

Pada pengujian hipotesis H₁ hingga H₅, penelitian menguji kesejahteraan masyarakat, faktor politik, dan manajemen risiko organisasi terhadap opini audit dengan hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 4. Hipotesis H₁ menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat berhubungan positif dengan opini audit LKPD. Pada tabel 4 ditunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat berhubungan positif signifikan terhadap opini audit LKPD sebab nilai probabilitas yang lebih kecil dari α (0,1) dan nilai koefisien yang positif. Penambahan kesejahteraan masyarakat berdampak menaikkan opini audit LKPD. Hal ini sejalan dengan hasil uji beda rerata bahwa variabel kesejahteraan masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel opini audit LKPD. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H₁ pada penelitian ini terbukti.

Hasil pengujian ini sejalan dengan Martani (2014), yang menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat mempunyai pengaruh positif terhadap opini audit LKPD. Ukuran yang dipakai dalam penelitian ini untuk mewakili tingkat kesejahteraan masyarakat adalah Indikator Pembangunan Manusia (IPM). Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*), IPM mengukur indeks pencapaian sejumlah komponen mendasar dalam mencapai taraf hidup manusia yang ideal. Terdapat tiga dimensi

yang dielaborasi menjadi satu kesatuan, masing-masing secara berturut-turut diukur adalah angka harapan hidup, harapan lama sekolah dan rerata lama sekolah, serta pengeluaran per kapita riil.

Masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan yang baik akan membentuk lingkungan sosial kemasyarakatan yang aktif dan kritis dalam mengawal program dan kinerja pemerintahannya. Sementara itu fakta di mana daerah dengan tingkat pendidikan tinggi akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas daripada daerah dengan tingkat pendidikan lebih rendah. Dimensi pembentuk IPM berikutnya yaitu tingkat kesehatan juga sama halnya dengan tingkat pendidikan, di mana semakin tinggi tingkat kesehatan masyarakat akan mendorong produktivitas kegiatan kemasyarakatan secara menyeluruh, khususnya porsi dalam pengawasan pemerintahannya. Yang terakhir adalah tingkat perekonomian masyarakat yang juga melengkapi standar hidup masyarakat, di mana masyarakat yang sudah sejahtera secara ekonomi tidak akan hanya berfokus pada kehidupan pribadinya namun juga mendorong kehidupan sosial kemasyarakatannya.

Besaran pengaruh kesejahteraan masyarakat terhadap kenaikan opini audit LKPD dijelaskan dengan nilai koefisien atau biasa disebut tingkat elastisitas. Kesejahteraan masyarakat memiliki nilai elastisitas sebesar 38,383, yang mengindikasikan setiap kenaikan satu persen kesejahteraan masyarakat akan menaikkan opini audit LKPD sebesar 38,383%.

Jangka Waktu Dengan Pemilu dan Opini Audit LKPD

Hipotesis H₂ menyatakan bahwa jangka waktu menuju pemilihan umum kepala daerah berhubungan negatif dengan opini audit LKPD. Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa nilai probabilitas tidak signifikan, ditandai dengan nilai probabilitas lebih besar dari α (0,1) dengan koefisien bertanda negatif. Hal tersebut dapat diartikan bahwa jangka waktu menuju pemilihan umum kepala daerah tidak memengaruhi opini audit LKPD. Maka dari itu, hipotesis H₂ dalam penelitian ini tidak terbukti.

Hasil pengujian beda rerata pada variabel jangka waktu menuju pemilihan umum kepala daerah menunjukkan hasil yang signifikan, membuktikan bahwa secara individual, jangka waktu menuju pemilihan umum kepala daerah memengaruhi opini audit LKPD secara signifikan. Namun, ketika dilakukan uji regresi, hasil menjadi tidak signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun masih jauh dari akhir masa jabatan, kepala daerah cenderung tidak lagi menggunakan media politik pencitraan lewat perbaikan kinerja, khususnya laporan keuangan, atau tidak efektifnya lagi politik pencitraan itu sendiri. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa jangka waktu Pemilu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap opini audit LKPD. Hasil ini tidak sejalan dengan Martani (2014) dan Efendi (2015) di mana jangka waktu pemilu kepala daerah memiliki pengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, salah satunya diukur melalui opini audit.

Pemerintah dengan kepala daerah yang berasal sudah mendekati Akhir Masa Jabatan (AMJ), cenderung akan mendorong perbaikan terhadap kerjanya, salah satu tujuannya adalah untuk mendapat atensi masyarakat kembali pada pemilihan kepala daerah periode selanjutnya. Hasil ini dikuatkan dengan analisis terhadap data sampel yang menunjukkan bahwa dari 610 sampel jangka waktu 3 hingga 5 tahun dari masa akhir jabatan yang notabene masih jauh menuju pemilihan kepala daerah selanjutnya, 484 di antaranya atau sebesar 79,34% merupakan daerah dengan perolehan opini audit WTP pada periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masih jauh dari akhir masa jabatan, kepala daerah cenderung tidak lagi menggunakan media politik pencitraan lewat perbaikan kinerja khususnya laporan keuangan atau tidak efektifnya lagi politik pencitraan itu sendiri.

Goenawan (2008) dalam penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa hal-hal di luar faktor prestasi dan gagasan sosial lebih efektif untuk mendongkrak elektabilitas. Fakta lain menyebutkan perihal kemungkinan korupsi guna persiapan dana kampanye oleh kepala daerah petahana. Sejak tahun 2017 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggencarkan strategi pengawasan dana kampanye calon

kepala daerah bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017. Proses sistematis dilakukan untuk memberikan saringan sumber pendanaan kampanye dan pada akhirnya disampaikan lewat Laporan Dana Kampanye yang dapat diakses publik. Hal ini mengurangi celah kepala daerah petahana untuk berbuat koruptif pada masa abadinya.

Politik Dinasti Memiliki Pengaruh Negatif terhadap Opini Audit LKPD

Hipotesis H_3 menyatakan bahwa politik dinasti berhubungan negatif dengan opini audit LKPD. Berdasarkan hasil pengujian, ditunjukkan bahwa nilai probabilitas menunjukkan nilai yang tidak signifikan, yakni lebih besar dari α (0,1), dengan koefisien positif. Hal tersebut dapat diartikan bahwa, pada penelitian ini politik dinasti tidak memiliki pengaruh pada opini audit LKPD. Atas sebab tersebut, hipotesis H_3 dalam penelitian ini tidak terbukti.

Hasil pengujian beda rerata pada variabel politik dinasti menunjukkan hasil yang signifikan, yang berarti, secara individual, politik dinasti memengaruhi opini audit LKPD. Namun, ketika dilakukan uji dengan model regresi, hasil menjadi tidak signifikan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pratolo (2015) disimpulkan bahwa politik dinasti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Seperti yang dikemukakan Mendoza dkk., (2012) bahwa prevalensi politik dinasti tidak selalu berkorelasi dengan kemiskinan yang tinggi, pembentukan standar hidup yang tidak optimal, maupun pembangunan manusia yang tidak merata. Walaupun stigma bahwa pejabat yang memiliki keterkaitan politik dinasti memiliki kemungkinan besar untuk terpilih, namun profil kompetensi yang dimiliki calon tersebut juga tidak selalu dalam posisi yang rendah. Keluarga yang terbentuk dari politik dinasti cenderung sudah memiliki persyaratan minimal, baik dari segi teknis dan manajerial, untuk dapat terpilih dalam periode yang selanjutnya. Pada akhirnya politik dinasti tidak memiliki pengaruh terlalu signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah (Pratolo, 2020).

Hasil ini juga dikuatkan oleh analisis terhadap data sampel, di mana terdapat banyak pemerintah daerah yang notabene memiliki kepala daerah yang berasal dari dinasti politik tetapi tetap berkinerja baik dan memperoleh opini audit WTP. Menurut data sampel dari pemerintah daerah dengan politik dinasti, sebesar 87% di antaranya tetap berkinerja baik dan memperoleh opini audit WTP.

Sistem Pengendalian Internal dan Opini Audit LKPD

Hipotesis H_4 menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berhubungan positif dengan opini audit LKPD. Menurut hasil pengujian, nilai probabilitas variabel sistem pengendalian internal menunjukkan nilai probabilitas signifikan dengan koefisien positif. Hasil pengujian tersebut sejalan dengan hasil uji rerata untuk variabel sistem pengendalian internal yang juga menunjukkan hasil signifikan. Dengan demikian, hipotesis H_4 terbukti.

Unit dengan satuan pengendali internal yang telah menerapkan sistem pengendalian internal dan dinilai dengan standar tertentu akan mendorong kinerja unit tersebut untuk mendapat opini audit yang memuaskan. Hal yang menguatkan hasil pengujian hipotesis ini adalah analisis terhadap data sampel yang menunjukkan bahwa dari 928 sampel dengan maturitas SPIP level 2 dan 3, sebanyak 830 di antaranya atau sebesar 89,430% memperoleh opini audit WTP. Dengan populasi data sampel sejumlah 1.305, persentase sampel dengan maturitas SPIP level 2 dan 3 yang mendapat opini audit WTP adalah sebesar 63,600%, yang menunjukkan bahwa instansi daerah yang berhasil mendapat kategori maturitas SPIP sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015—2019 atau minimal satu level dibawahnya berhasil membangun sistem tata kelola keuangan yang efektif mencegah risiko-risiko, baik keuangan dan kinerja, yang mungkin dapat terjadi dan menghambat tujuan organisasi.

Hal tersebut yang pada akhirnya mendorong pencapaian kinerja dan keuangan yang baik, ditunjukkan dengan parameter opini audit yang memuaskan. Hasil pengujian menunjukkan elastisitas sistem pengendalian internal sebesar 0,059 yang mengindikasikan setiap kenaikan satu persen infrastruktur sistem pengendalian internal akan menaikkan opini audit LKPD sebesar 0,059%.

Audit Internal dan Opini Audit LKPD

Hipotesis H_5 menyatakan bahwa audit internal berhubungan positif dengan opini audit LKPD. Berdasarkan hasil pengujian, ditunjukkan bahwa nilai probabilitas menunjukkan nilai yang tidak signifikan, yakni lebih besar dari α (0,1), dengan koefisien positif. Hal tersebut dapat diartikan bahwa, pada penelitian ini, audit internal tidak memiliki pengaruh pada opini audit LKPD. Atas sebab tersebut, hipotesis H_5 dalam penelitian ini tidak terbukti. Hasil pengujian beda rerata pada variabel audit internal menunjukkan hasil yang signifikan, yang berarti, secara individual, audit internal memengaruhi opini audit LKPD. Namun, ketika dilakukan uji dengan model regresi, hasil menjadi tidak signifikan.

Penelitian ini berbanding lurus dengan Wulandari (2015), di mana kapabilitas APIP tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap opini audit yang dihasilkan BPK-RI, di mana peran APIP akan maksimal dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi apabila telah mencapai kriteria yang cukup tinggi dalam operasinya atau masih terdapat celah pada SPIP yang diterapkan oleh organisasi. *Financial Service Authority* (2013) mencetuskan lahirnya model *Three Lines of Defense* dalam penerapan manajemen risiko organisasi dan menempatkan unit audit internal pada posisi terakhir dalam perlindungan organisasi. Manajer operasi yang memiliki dan mengelola risiko adalah lapisan pertama. Kemudian fungsi atau unit organisasi yang melakukan asistensi dan pemantauan lapis pertama disebut pertahanan lapis kedua. Lapis pertama dan kedua inilah yang bertugas secara langsung dalam mengelola sistem pengendalian internalnya. Terakhir adalah audit internal yang memberikan *assurance* yang memadai terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Sasaran organisasi dari lapis pertama dan kedua juga menjadi tugas unit audit internal untuk didorong dan dikawal.

Hal yang menguatkan hasil pengujian hipotesis ini adalah analisis terhadap data sampel yang menunjukkan bahwa dari 830 sampel dengan maturitas SPIP level 2 dan 3 yang berhasil mencapai opini audit WTP, sebanyak 386 di antaranya atau sebesar 46,5% diraih tanpa melalui audit internal level 3 atau seperti yang diamanatkan dalam RPJMN 2015—2019, yang menunjukkan peran manajemen organisasi dalam membangun sistem pengendalian internalnya telah berhasil membangun sistem tata kelola keuangan yang efektif mencegah risiko-risiko, baik keuangan dan kinerja, yang mungkin dapat terjadi, sehingga peran APIP sebagai pertahanan lapis berikutnya tidak terlampaui signifikan. Adapun perbaikan sistem pengendalian internal yang dilakukan manajemen juga merupakan satu proses yang tidak terpisahkan dari rekomendasi yang disampaikan oleh APIP, sehingga secara tidak langsung perbaikan level SPIP dari tahun ke tahun juga merupakan kerja sama dengan APIP dalam rangka mencapai tujuan bersama organisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat mempunyai pengaruh positif terhadap opini audit LKPD. Jangka waktu Pemilu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap opini audit LKPD. Hal ini disebabkan antara lain, faktor prestasi dan gagasan sosial sudah tidak lagi efektif untuk mendongkrak elektabilitas, sedangkan perihal kemungkinan korupsi guna persiapan dana kampanye oleh kepala daerah petahana, sistem kenegaraan untuk menyelamatkan kampanye dari tindakan koruptif sudah dirumuskan dengan sistematis dilakukan untuk memberikan keterbukaan publik sehingga mengurangi celah kepala daerah petahana untuk berbuat koruptif pada masa abadinya. Selanjutnya, politik dinasti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap opini audit LKPD.

Prevalensi politik dinasti tidak selalu berkorelasi dengan kemiskinan yang tinggi, pembentukan standar hidup yang tidak optimal, maupun pembangunan manusia yang tidak merata. Walaupun stigma bahwa pejabat yang memiliki keterkaitan politik dinasti memiliki kemungkinan besar untuk terpilih, namun profil kompetensi yang dimiliki calon tersebut juga tidak selalu dalam posisi yang rendah. Keluarga yang terbentuk dari politik dinasti cenderung sudah memiliki persyaratan minimal, baik dari segi teknis dan manajerial, untuk dapat terpilih dalam periode yang selanjutnya. Pada akhirnya politik dinasti tidak memiliki pengaruh terlalu signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah. Sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap opini audit LKPD. Sedangkan audit internal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap opini audit LKPD. Lahirnya model *Three Lines of Defense* dalam penerapan manajemen risiko organisasi dan menempatkan unit audit internal pada posisi terakhir dalam perlindungan organisasi. Peran audit internal akan maksimal dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi apabila telah mencapai kriteria yang cukup tinggi dalam operasinya atau masih terdapat celah pada sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh organisasi.

Implikasi dari penelitian ini bagi pemerintah daerah, hasil ini menguatkan fakta bahwa masyarakat yang sejahtera bukanlah sebuah konsep lagi melainkan merupakan sebuah kepastian terkait kehadiran masyarakat yang kompeten dan turut aktif dalam mengawasi kinerja daerahnya. Dorongan masyarakat yang aktif baik saat prapengawasan seperti di Musrenbang sampai dengan pengawasan melalui media saluran pengaduan dan sebagainya, menjadi tuntutan pemerintah daerah untuk selalu bekerja optimal dan akuntabel. Juga dapat dipertimbangkan pentingnya penguatan aspek manajemen risiko organisasi, mengingat model ini sudah dipergunakan secara luas pada semua bentuk organisasi, dalam rangka menunjang kinerja dan akuntabilitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2016). *Pengaruh Kapabilitas APIP terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan K/L. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*.
<http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2747/16.062-Pengaruh-Kapabilitas-APIP-terhadap-Akuntabilitas-Laporan-Keuangan-KL>
- Darmawan, R. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Di Skpd Kabupaten Bengkalis. *JOM Fekon*, 3(1),792–806
- Darmawati. (2017). Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ketidapatuhan terhadap Perundang-undangan, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap Opini BPK RI (Tesis Tidak Diterbitkan). Universitas Lampung.
- Efendi, Y. N. (2014). Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat dan Stabilitas Politik terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 5(1), 1–29.
- Giroux, G., & R. Jones. (2011). Measuring Audit Quality of Local Government in England and Wales. *Research in Accounting Regulations*, 23(1), 60–66.
- Gourevitch, P., A. (2003). *The Politics of Corporate Governance Regulation*. Oxford University Press.
- Jensen, M., C., W. Meckling. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Finance Economic*, 3(4),305–360.
- Junaidi, H., B., Yurianto, P. S., & Nurdiono. (2015). The Effects of Auditor Reputation, Financial Condition, and Potential Intensive Economy on Artificial Auditor Rotation. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 2(1), 291–300.

- Mendoza, R. (2012). *Dynasties in Democracies: The Political Side of Inequality*. *VoxEU CEPR*.
https://voxeu.org/article/dynasties-democracies-political-side-inequality?quicktabs_tabbed_recent_articles_block=1
- _____. (2012). *Inequality in Democracy: Insights from an Empirical Analysis of Political Dynasties in the 15th Philippine Congress*. *Philippine Political Science Journal*, 33(2), 132–145.
- Pratolo, S., & Aji, T. S. W. (2017). *Pengaruh Politik Dinasti dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Akuntabilitas Pelaporan Sebagai Variabel Pemediasi: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2012-2015*. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 13(1), 153–170. <https://doi.org/10.18196/rab.020229>
- Pratolo, S. & Iramwati, D. F. (2020). *Determinan Akuntabilitas Laporan Keuangan: Tinjauan Pada Kinerja dan Politik di Pemerintahan Daerah di Indonesia*. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(3), 800–814. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i03.p20>
- Rasmini, N. K. & Masdiantini, P. R. (2018). *Fiscal Decentralization, Internal Control System, Accountability of Local Government and Audit Opinion*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 13(2), 123–132.
- Swaroop, V., & Rajkumar, A.S. (2002). *Public Spending and Outcomes: Does Governance Matter*. *World Bank Policy Research Working Paper*.
<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/14248>
- Suseno, F.M., & Muhammad, A.S.H. (1999). *Demokrasi dan Civil Society*. LP3ES.
- Wulandari, I., & Bandi. (2015). *Pengaruh E-Government, Kapabilitas APIP, dan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 15(2), 148–157.

